

BAB III

DESKRIPSI GEOGRAFIS DAERAH PENELITIAN

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah administratif yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena berada dalam kawasan aglomerasi Surakarta Raya, sehingga berperan penting dalam dinamika pembangunan regional. Secara geografis dan morfologis, wilayah Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh dataran rendah hingga perbukitan ringan yang mendukung aktivitas pertanian lahan basah sekaligus memungkinkan perkembangan kawasan permukiman dan industri secara relatif merata (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025). Perkembangan wilayah ini menunjukkan adanya proses peri-urbanisasi sebagai dampak ekspansi aktivitas ekonomi dan sosial dari Kota Surakarta yang memicu transformasi struktur ekonomi, perubahan penggunaan lahan, serta pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah di wilayah pinggiran (Pradoto et al, 2024).

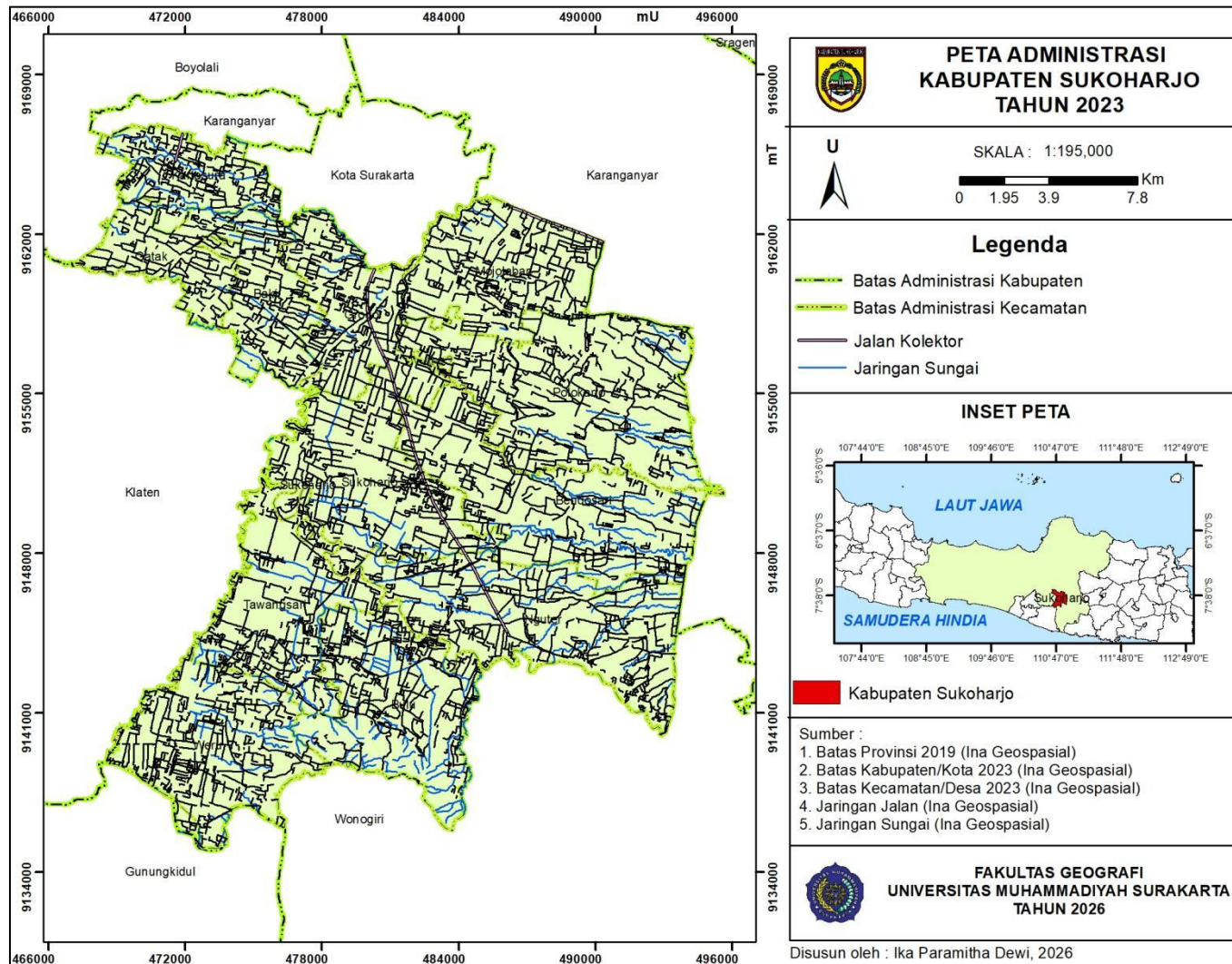
3.1 Letak, Luas, dan Batas

Kabupaten Sukoharjo secara astronomis terletak pada koordinat $110^{\circ}42'6''$ - $110^{\circ}57'33''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}32'17''$ - $7^{\circ}49'32''$ Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga utama Surakarta dengan karakteristik wilayah yang didominasi dataran rendah di bagian utara dan wilayah perbukitan di bagian selatan. Kondisi geografis tersebut memengaruhi pola perkembangan permukiman, jaringan transportasi, serta distribusi fasilitas pelayanan publik termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2026).

Tahun 2025, Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah sekitar 49,323 Ha dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 918.610 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.862 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk

tersebut menjadi tantangan dalam pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pada wilayah dengan perkembangan perkotaan yang pesat seperti Kecamatan Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2026). Luas wilayah dan distribusi penduduk menjadi dasar penting dalam analisis spasial untuk menghitung keterjangkauan pelayanan FKTP terhadap permukiman masyarakat.

Semakin padat suatu wilayah, maka kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan dasar juga semakin tinggi sehingga distribusi pelayanan perlu dilakukan secara lebih merata dan responsif terhadap mobilitas penduduk (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025). Secara administratif, Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul di sebelah selatan, Kabupaten Karanganyar di sebelah timur, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Kondisi tersebut menciptakan dinamika aksesibilitas lintas wilayah, dimana masyarakat pada kawasan perbatasan cenderung memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat tanpa terikat batas administratif. Oleh karena itu, kajian mengenai pola persebaran dan jangkauan pelayanan FKTP menjadi penting untuk mengidentifikasi wilayah yang belum terlayani secara optimal (*underserved area*) serta mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan yang adil dan inklusif sesuai arah kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025; World Health Organization, 2024).



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

3.2 Geologi

Kabupaten Sukoharjo secara regional terletak pada zona peralihan fisiografis yang kontras antara dataran rendah Kota Surakarta di bagian utara dan kawasan Pegunungan Selatan Jawa di bagian selatan. Kondisi geomorfologi wilayah ini berkembang di bawah pengaruh dua proses utama, yaitu sedimentasi fluvial pada dataran rendah serta aktivitas vulkanisme kuarter dan tektonisme aktif di wilayah selatan (Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025). Berdasarkan interpretasi Peta Geologi Kabupaten Sukoharjo pada gambar 3.2 yang disusun pada tahun 2026, wilayah utara dan tengah yang mencakup Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, dan Sukoharjo secara spasial didominasi oleh satuan Aluvial dan Batuan Gunungapi Tak Terpisah.

Koridor timur hingga tenggara yang meliputi Kecamatan Mojolaban, Polokarto, Bendosari, dan sebagian Nguter diselimuti oleh endapan Lahar Lawu. Satuan aluvium dan endapan vulkanik ini tersusun atas material lepas (*unconsolidated*) berupa pasir, kerikil, lanau, lempung, serta tuf hasil rombakan aktivitas gunung api (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2025). Karakteristik material sedimen ini memiliki daya dukung (*bearing capacity*) yang relatif rendah dan rentan terhadap penurunan muka tanah (*land subsidence*) akibat beban antropogenik (Saputra & Wibowo, 2022).

Meskipun demikian, topografinya yang relatif datar menjadikan wilayah utara dan tengah ini berkembang pesat sebagai pusat permukiman, aktivitas ekonomi, dan jaringan transportasi. Sebaliknya, visualisasi pada gambar 3.2 memperlihatkan variasi litologi yang jauh lebih tua dan kompleks di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo, khususnya di Kecamatan Tawang Sari, Bulu, dan Weru. Area perbukitan ini disusun oleh batuan Tersier yang termasuk ke dalam Formasi Semilir, Formasi Mandalika, dan Formasi Wonosari. Formasi Mandalika didominasi oleh produk vulkanik laut dalam berupa breksi andesit,

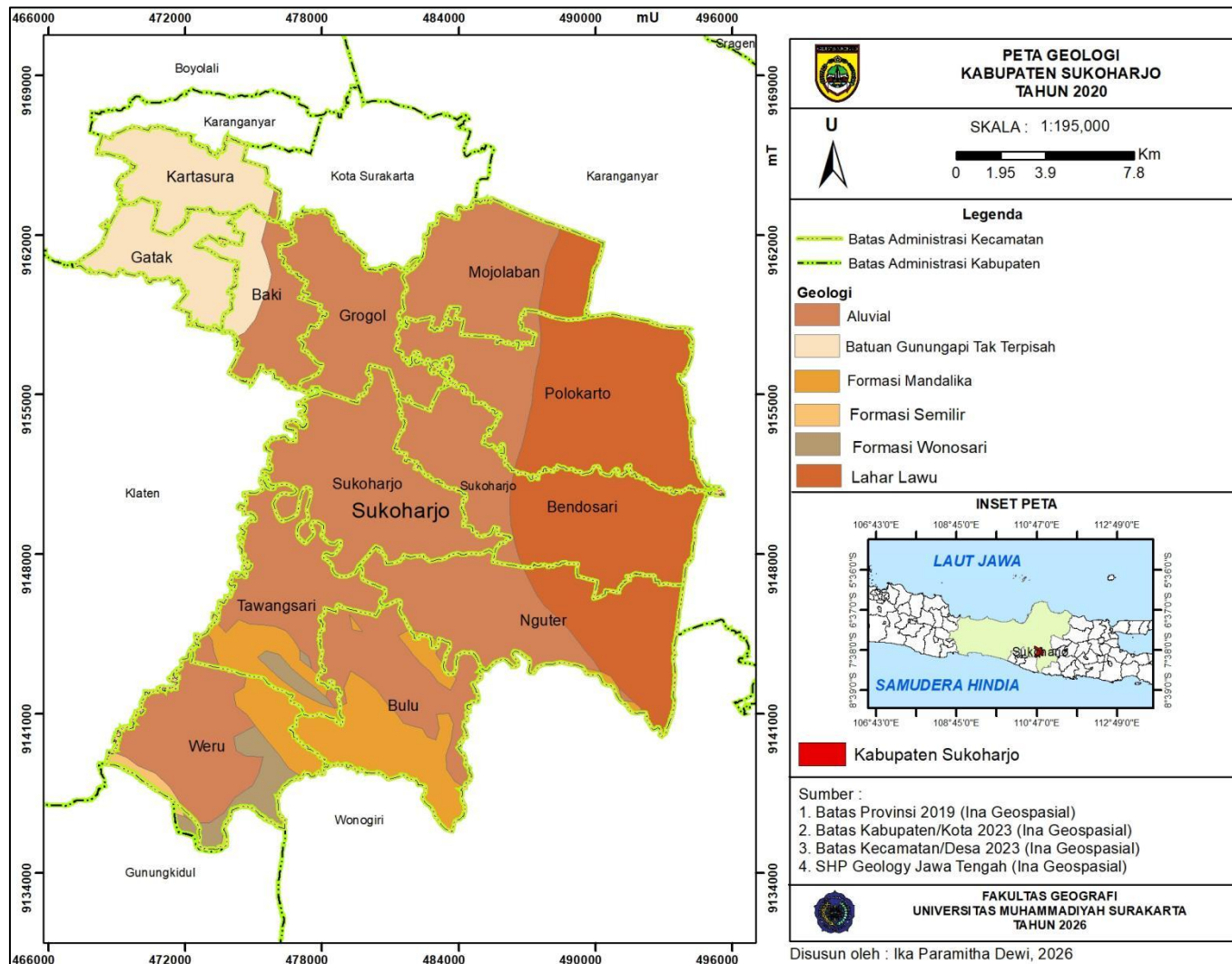
tuf, dan lava andesitik, sedangkan Formasi Wonosari tersusun atas batugamping klastik serta batugamping terumbu yang terbentuk pada lingkungan laut dangkal.

Struktur geologi yang berkembang di kawasan Pegunungan Selatan ini dikontrol oleh aktivitas deformasi kompresional tektonik regional Jawa bagian tengah, yang menghasilkan pola kekar, sesar mendatar, serta lipatan antiklin dan sinklin berarah dominan Barat Laut-Tenggara (Kusuma et al, 2024). Keberadaan struktur tektonik dan karakteristik batuan keras (*bedrock*) tersebut membentuk bentang alam perbukitan struktural dengan kemiringan lereng yang relatif tinggi dan curam dibanding wilayah utara.

Perbedaan karakteristik litologi yang kontras antara wilayah utara-tengah dan selatan Sukoharjo ini menghasilkan respons geoteknik serta tingkat kerentanan yang berbeda terhadap beban infrastruktur maupun getaran seismik. Tanah aluvial di dataran rendah cenderung mengalami amplifikasi gelombang gempa, sehingga wilayah utara Sukoharjo memiliki risiko penguatan getaran gempa yang lebih tinggi (Pratama & Setiawan, 2023). Sebaliknya, wilayah selatan yang tersusun atas batuan vulkanik padat dan batugamping memiliki stabilitas geologi yang jauh lebih baik untuk fondasi bangunan keras (Hidayat & Nugroho, 2025).

Namun, dinamika topografi perbukitan di wilayah selatan ini menyimpan potensi ancaman bencana longsor akibat kemiringan lereng yang curam (Putri & Ramadhan, 2026). Dalam konteks kajian persebaran fasilitas kesehatan, kondisi geologi Kabupaten Sukoharjo ini menjadi faktor pembatas sekaligus pendukung dalam stabilitas bangunan serta keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, 2025). Wilayah dataran rendah di bagian utara dan tengah cenderung lebih ideal untuk pembangunan sarana fisik, perluasan jaringan transportasi, dan pemerataan distribusi ekonomi sehingga mempercepat jangkauan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pembangunan fasilitas kesehatan pada wilayah aluvial dan endapan lahar ini tetap memerlukan perhatian khusus terhadap aspek rekayasa geoteknik serta mitigasi risiko kebencanaan geologi (Pratama & Setiawan, 2023). Sementara itu, wilayah selatan Sukoharjo sebenarnya memiliki daya dukung batuan yang sangat kokoh untuk fondasi bangunan vital rumah sakit atau puskesmas, tetapi kendala morfologi yang berbukit-bukit dan terjal membatasi keterjangkauan geografis masyarakat, meningkatkan biaya mobilitas, serta memicu terbentuknya zona terisolasi (*blank spot* atau *underserved area*) pelayanan kesehatan (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, 2025; Putri & Ramadhan, 2026).



Gambar 3.2 **Peta Geologi**

3.3 Geomorfologi

Kabupaten Sukoharjo secara geomorfologis terletak pada tatanan geologi yang kompleks dalam wilayah cekungan antar pegunungan (*intermountain basin*) yang dikelilingi pegunungan struktural dan vulkanik. Berdasarkan Peta Geomorfologi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 pada Gambar 3.3, wilayah ini secara spasial didominasi oleh lima satuan bentuklahan utama, yaitu Dataran Aluvial, Dataran Bergelombang Lemah, Pegunungan Struktural Terjal, Perbukitan Bergelombang, dan Perbukitan Struktural Terkikis. Secara topografi, wilayah ini menunjukkan kontras yang jelas antara bentuklahan Dataran Aluvial yang sangat luas di bagian utara dan tengah (meliputi Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, Sukoharjo, hingga Tawang Sari) dengan zona perbukitan dan pegunungan struktural di bagian selatan serta timur (Kecamatan Bulu, Weru, Polokarto, Bendosari, dan Nguter).

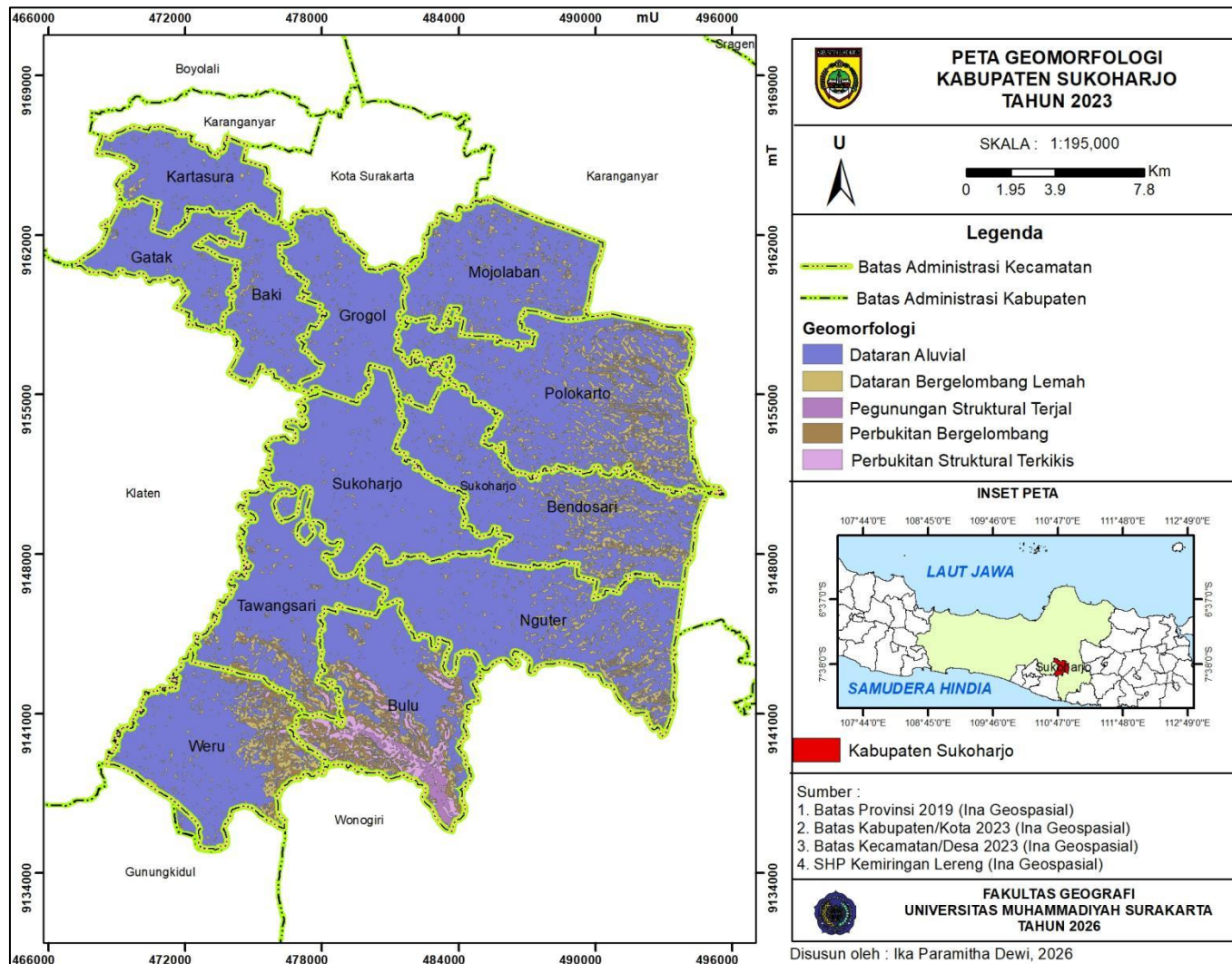
Ketinggian rata-rata wilayah berada pada 102 meter di atas permukaan laut (mdpl), dimana kawasan dataran rendah merupakan bagian dari sistem dataran banjir (*floodplain*) Sungai Bengawan Solo, yang tersusun atas endapan aluvial kuartar (BMKG, 2021). Morfologi di wilayah selatan dicirikan oleh Pegunungan Struktural Terjal dan Perbukitan Struktural Terkikis yang merupakan bagian dari Pegunungan Selatan (*Southern Mountains*), tersusun atas batuan beku andesitik, breksi vulkanik, dan batugamping dari aktivitas gunung api purba bawah laut (Hartono et al, 2021).

Dinamika bentang alam di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh proses fluvial, denudasional, dan struktural yang aktif. Proses fluvial menjadi agen pengubah paling dominan di kawasan Dataran Aluvial melalui mekanisme sedimentasi dan erosi sungai yang intensif di sepanjang aliran Bengawan Solo. Karakteristik tanah aluvial yang memiliki kemampuan infiltrasi rendah meningkatkan kerentanan wilayah dataran ini terhadap banjir luapan saat curah hujan tinggi di hulu (Pradana & Alfiani, 2021). Di sisi lain,

proses denudasional bekerja aktif pada bentuklahan Perbukitan Bergelombang dan Dataran Bergelombang Lemah yang tersebar luas di Polokarto, Bendosari, Nguter, hingga Bulu dan Weru melalui pelapukan lanjut batuan vulkanik menjadi tanah latosol dan litosol.

Laju erosi di wilayah tangkapan air ini sering dipercepat oleh alih fungsi lahan, sehingga menyuplai sedimen dalam jumlah besar ke cekungan di bawahnya (Suryono, 2023). Keterbentukan satuan Pegunungan Struktural Terjal dan Perbukitan Struktural Terkikis di wilayah selatan dikontrol kuat oleh proses struktural masa lalu berupa eksistensi lipatan dan gawir (tebing patahan) tektonik yang menentukan pola relief lanskap serta kontrol aliran air tanah setempat (Pangestu, 2021).

Kombinasi antara kondisi topografi datar dan proses geomorfologi aktif berimplikasi signifikan terhadap risiko kebencanaan di Kabupaten Sukoharjo. Analisis spasial menunjukkan bahwa sekitar 53,81% wilayah Sukoharjo memiliki ancaman banjir yang tinggi karena posisi Dataran Aluvial secara geomorfologis berfungsi sebagai area akumulasi air dari daerah perbukitan di sekelilingnya (Kusumawati et al, 2021). Karakteristik fisik tanah dan kemiringan lereng yang sangat landai di area permukiman padat membuat drainase alami bekerja kurang optimal. Secara bersamaan, material hasil pelapukan intensif di kawasan Pegunungan Struktural Terjal dan Perbukitan Struktural Terkikis di Kecamatan Bulu dan Weru menyimpan potensi risiko gerakan tanah (tanah longsor) yang tinggi, terutama karena zona lereng curam tersebut telah diperlemah oleh struktur patahan geologi yang ada (Sutopo & Rahmawati, 2024).



Gambar 3.3 Peta Geomorfologi Kabupaten Sukoharjo

3.4 Tanah

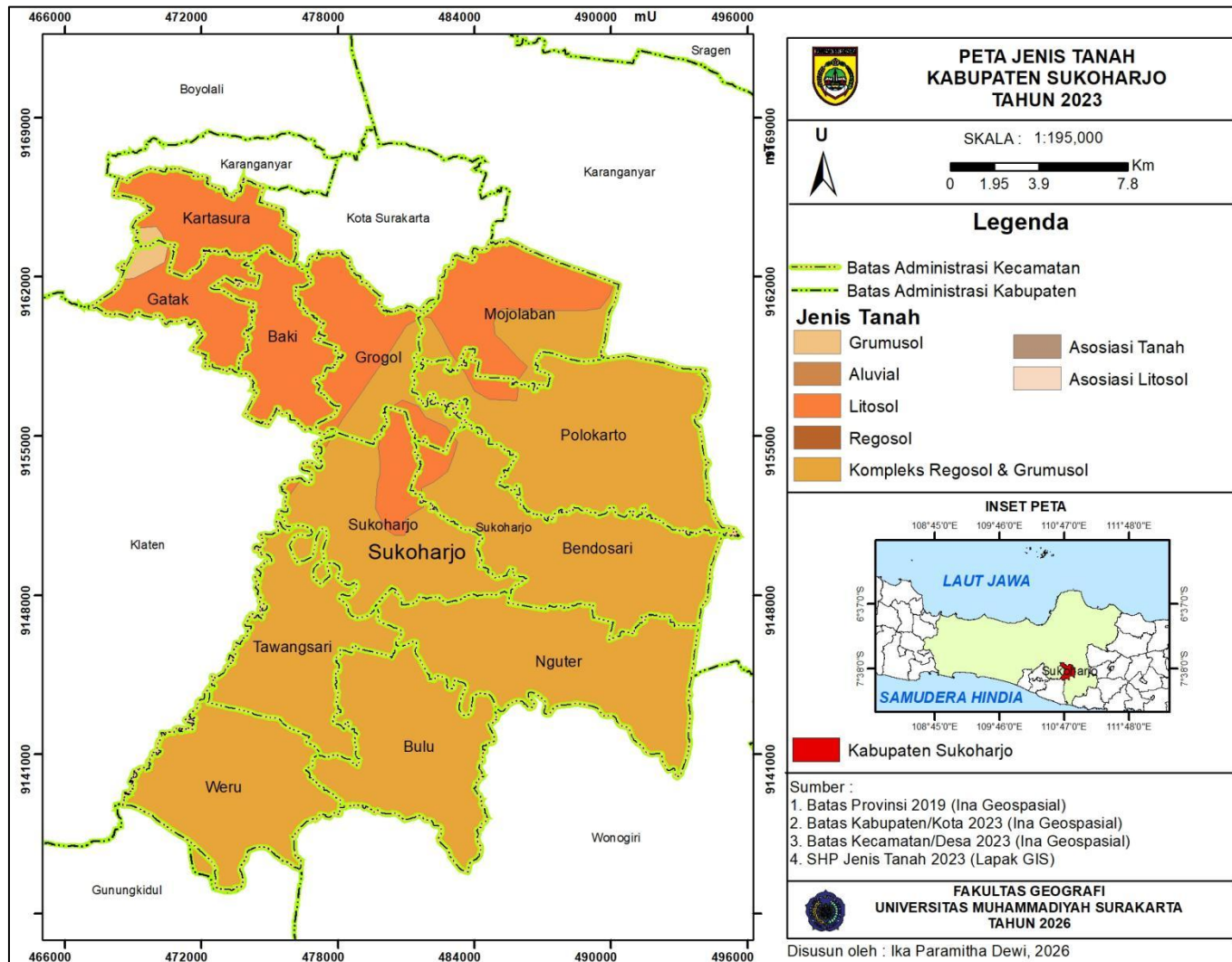
Karakteristik tanah di Kabupaten Sukoharjo ditentukan oleh interaksi antara material induk vulkanik, aktivitas fluvial Sungai Bengawan Solo, dan kondisi topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga perbukitan kapur di bagian selatan. Berdasarkan peta jenis tanah Kabupaten Sukoharjo, wilayah ini secara spasial didominasi oleh tanah Grumusol yang areanya membentang luas dari wilayah utara hingga tenggara, mencakup Kecamatan Kartasura, Baki, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Bendosari, hingga Nguter.

Tanah Grumusol terbentuk dari material induk batuan sedimen dan abu vulkanik yang mengalami pelapukan di daerah dengan drainase buruk serta memiliki iklim dengan pergantian musim yang kontras. Proses pedogenesisnya melibatkan mekanisme pengadukan alami (*argillipedoturbation*) akibat sifat kembang kerut mineral lempung tipe montmorillonit yang tinggi. Kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa pada musim kemarau, tanah Grumusol di Sukoharjo akan mengalami pengerutan hebat hingga membentuk rekahan-rekahan dalam yang dapat merusak infrastruktur bangunan dan jalan, sedangkan pada musim hujan tanah tersebut mengembang, melumpur, dan menjadi sangat kedap air (Hidayat & Hardiyanto, 2021; Prasetyo et al, 2024).

Jenis tanah Aluvial menempati posisi penting sebagai jalur fluvial yang sangat dinamis di sepanjang dataran banjir (*floodplain*) daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Peta menunjukkan keberadaan tanah Aluvial ini terkonsentrasi di bagian barat hingga tengah, mengalir di sepanjang perbatasan wilayah Gatak dan Sukoharjo. Sebagai tanah muda yang perkembangannya belum lanjut, karakteristik fisik dan kimia tanah Aluvial di wilayah ini sangat bergantung pada pasokan material sedimen yang dibawa dari hulu vulkanik. Secara aktual, wilayah aluvial ini merupakan zona pertanian lahan basah (sawah lestari) yang sangat produktif di Sukoharjo karena memiliki tekstur geluh hingga lempung yang kaya akan retensi unsur hara mineral (Putra & Sartohadi, 2022; Ramadhan et al, 2025).

Variasi karakteristik tanah di zona transisi dan perbukitan Sukoharjo dicirikan oleh keberadaan Litosol, Regosol, serta bentuk asosiasinya. Tanah Litosol dan Asosiasi Litosol terlihat menyebar secara spesifik di bagian barat laut, khususnya di Kecamatan Gatak, serta di bagian tengah (Kecamatan Sukoharjo). Sebaliknya, di wilayah perbukitan bagian selatan yang meliputi Kecamatan Bulu dan Weru, peta menunjukkan dominasi asosiasi tanah yang digolongkan sebagai Kompleks Regosol & Grumusol serta Asosiasi Tanah.

Geomorfologi wilayah selatan Sukoharjo yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu didominasi oleh pelapukan batugamping dan batuan induk vulkanik tua. Proses pembentukan tanah di area berlereng ini melibatkan pencucian (*leaching*) unsur basa secara intensif akibat curah hujan, sehingga menghasilkan tanah yang tipis, kaya oksida besi, dan memiliki solum dangkal. Kondisi terkini di lapangan mengindikasikan bahwa wilayah selatan Sukoharjo ini memiliki tingkat kerentanan erosi dan kekeringan hidrologis yang tinggi apabila vegetasi penutup lahan di lereng-lereng perbukitan mengalami degradasi (Wicaksono & Utami, 2023; Nugroho et al, 2026).



Gambar 3.4 Peta Jenis Tanah

3.5 Curah Hujan

Analisis spasial mengenai jangkauan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Sukoharjo memerlukan pemahaman komprehensif terhadap variabel klimatologi, mengingat faktor cuaca merupakan determinan eksternal yang memengaruhi aksesibilitas fisik dan mobilitas penduduk. Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo berada pada zona iklim tropis yang dicirikan oleh variasi curah hujan bulanan yang fluktuatif serta suhu udara yang relatif hangat sepanjang tahun. Menurut klasifikasi Oldeman, wilayah ini didominasi oleh tipe iklim yang memiliki bulan basah dan bulan kering yang tegas, yang secara langsung berdampak pada potensi hambatan transportasi menuju pusat kesehatan primer saat intensitas hujan mencapai titik kulminasi (Ramadhan & Herliany, 2023).

Berdasarkan data klimatologi tahun 2024 dari *Open Data* Sukoharjo yang disajikan pada Tabel 1.5, sebaran kuantitas curah hujan secara keruangan di 12 kecamatan menunjukkan variasi spasial yang sangat dinamis.

Tabel 1.5 Data Curah Hujan Kabupaten Sukoharjo 2024.

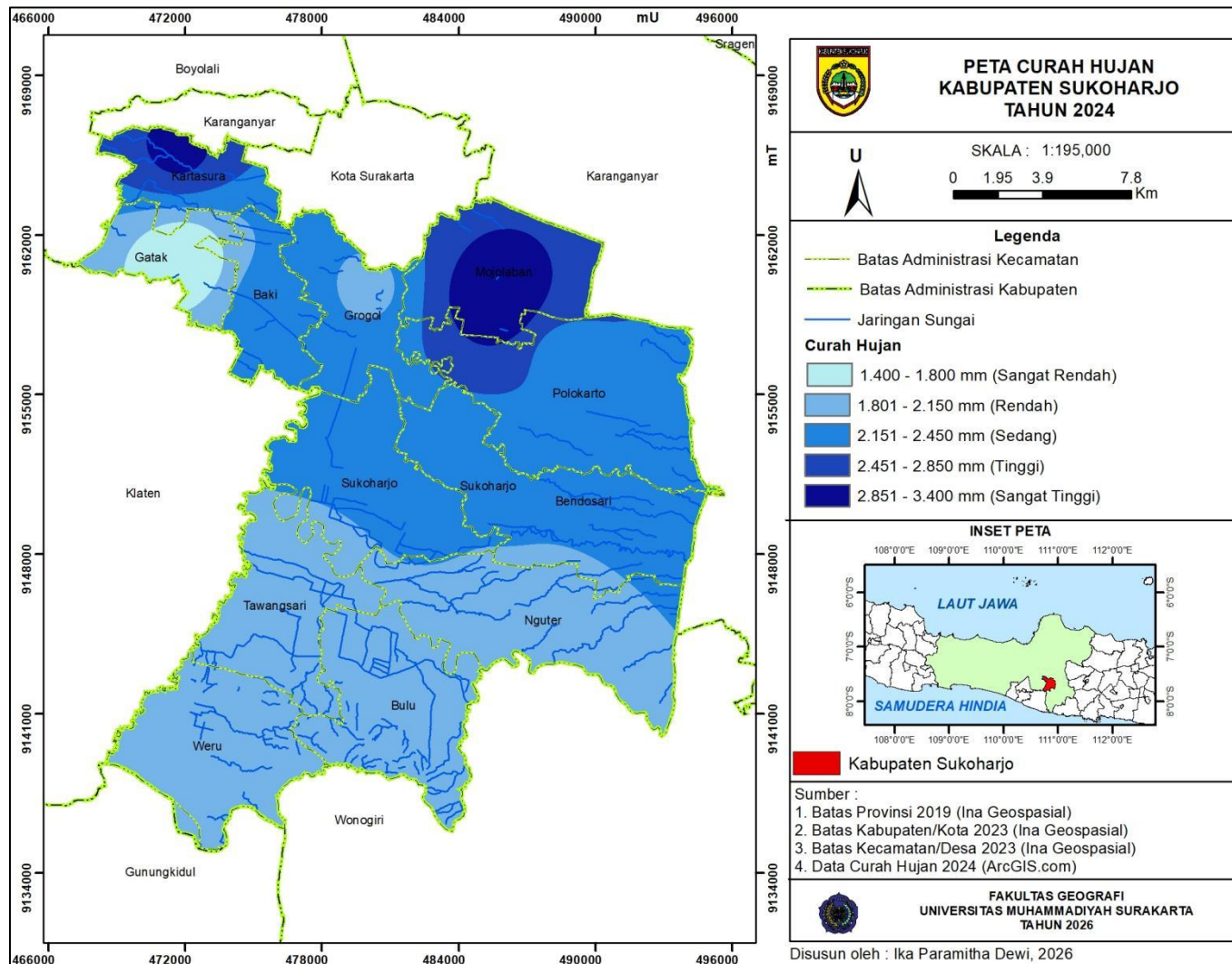
Kecamatan	Jumlah Curah Hujan (mm)
Weru	2.038
Bulu	1.874
Tawang Sari	1.961
Sukoharjo	2.242
Nguter	1.944
Bendosari	2.191
Polokarto	2.357
Mojolaban	3.397
Grogol	2.064

Baki	2.476
Gatak	1.448
Kartasura	2.992

Sumber: Open Data Sukoharjo, 2024

Karakteristik musiman yang kuat ini divisualisasikan secara spasial melalui peta interpolasi pada Gambar 3.5 Peta Curah Hujan, dimana wilayah Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi lima zonasi intensitas curah hujan dengan kecenderungan nilai tinggi di sisi utara dan timur laut. Kecamatan Mojolaban mencatat akumulasi curah hujan tertinggi mencapai 3.397 mm (kategori tertinggi), diikuti oleh Kecamatan Kartasura sebesar 2.992 mm dan Kecamatan Baki sebesar 2.476 mm. Tingginya curah hujan di zona-zona tersebut berkorelasi dengan letak geografisnya yang berada pada zona peralihan urban-peri urban serta didukung oleh keberadaan jaringan drainase permukaan yang rapat sebagaimana terpetakan pada gambar.

Intensitas curah hujan terendah terdeteksi di Kecamatan Gatak dengan nilai 1.448 mm (kategori rendah), diikuti oleh koridor selatan yang didominasi klasifikasi berkisar antara 1.801-2.150 mm meliputi Kecamatan Bulu (1.874 mm), Nguter (1.944 mm), Tawang Sari (1.961 mm), dan Weru (2.038 mm). Area dengan intensitas curah hujan tingkat sedang berada di bagian tengah secara linier, mencakup Kecamatan Bendosari (2.191 mm), Sukoharjo Kota (2.242 mm), dan Polokarto (2.357 mm).



Gambar 3.5 Peta Curah Hujan

3.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan manifestasi spasial dari interaksi dinamis antara aktivitas sosio-ekonomi manusia dengan lingkungan fisiknya dalam suatu periode waktu tertentu. Lahan tidak hanya dipandang sebagai bentang alam statis, melainkan modal utama dan ruang hidup bagi seluruh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya melalui berbagai bentuk pemanfaatan ruang (Prasetyo dkk, 2023). Dalam konteks pembangunan dan perencanaan wilayah, struktur penggunaan lahan mencerminkan bagaimana fungsi-fungsi sosial, ekonomi, pertanian, hingga penyediaan sarana publik didistribusikan secara geografis (Setiawan & Rahayu, 2024).

Karakteristik tata ruang suatu wilayah secara langsung akan membentuk pola permukiman, arah perkembangan infrastruktur, serta tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan dasar. Fenomena alih fungsi lahan (konversi lahan) dari sektor agraris menjadi kawasan terbangun seperti permukiman, perdagangan, dan industri terutama yang terjadi secara masif di koridor utara Kabupaten Sukoharjo menuntut adanya evaluasi dan penyesuaian distribusi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) agar pelayanan medis tetap mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif, setara, dan efisien (Ramadhan & Nurhadi, 2022).

Berdasarkan hasil visualisasi pada Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sukoharjo, struktur pemanfaatan ruang di wilayah ini secara spasial menunjukkan karakteristik wilayah transisi agraris-perkotaan yang sangat dinamis. Komposisi luas lahan untuk setiap kelas penggunaan lahan aktual hasil pengolahan data spasial disajikan pada Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis di Kabupaten Sukoharjo 2025.

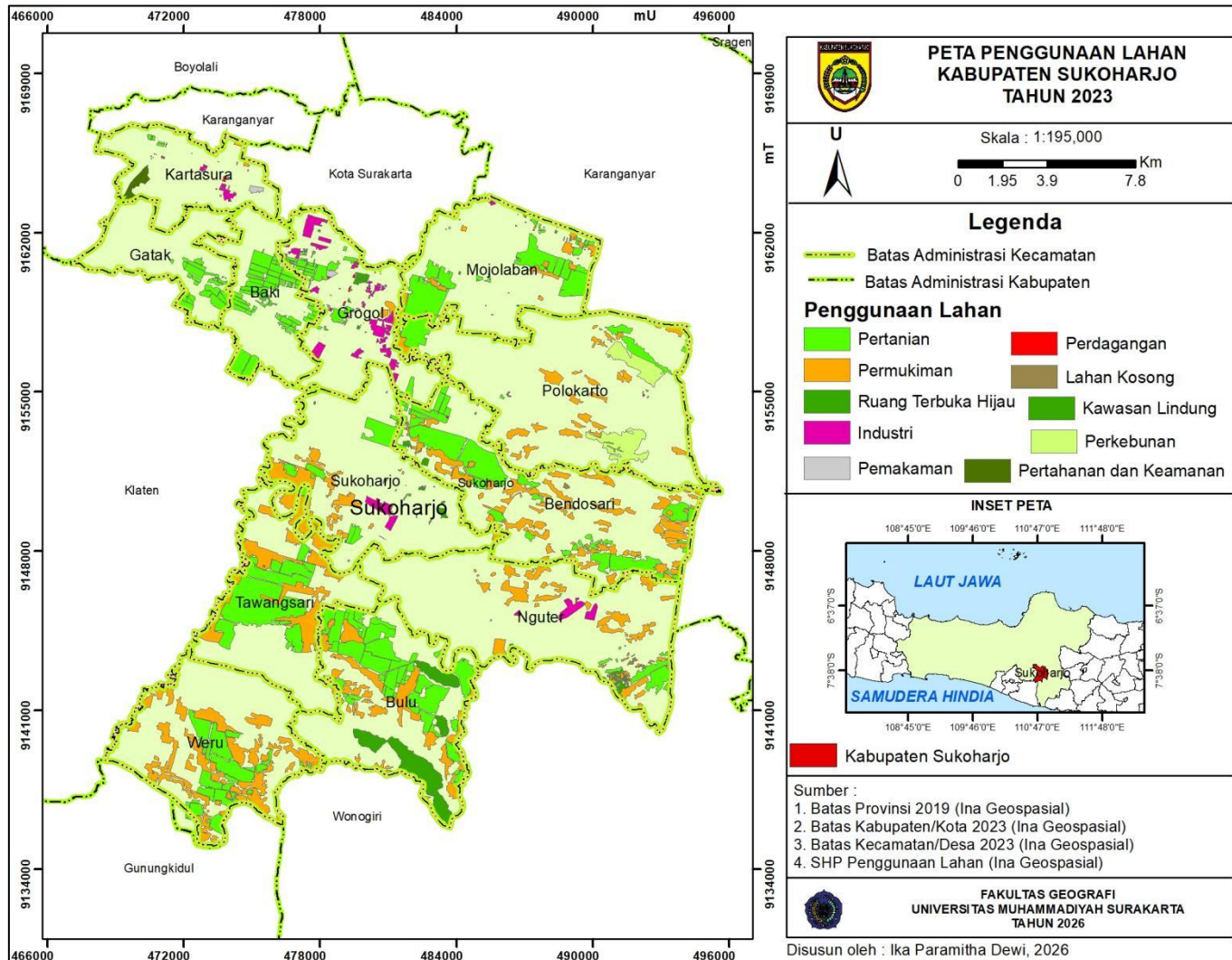
No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Hektar)	Persentase (%)
1	Pertanian (Sawah & Ladang)	27.334,81	55,42
2	Permukiman/ Pekarangan	16.720,50	33,90
3	Industri	2.416,83	4,90
4	Perdagangan dan Jasa	1.188,68	2,41
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	650,45	1,32
6	Lain-lain (Kawasan Lindung, Perkebunan, Pemakaman, Hankam, Lahan Kosong)	1.011,73	2,05
Total		49.323 Hektar	100

Sumber: Hasil Analisis Data Aktual Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (Diolah, 2026).

Merujuk pada peta tata ruang aktual, dominasi sektor Pertanian (gabungan lahan sawah dan ladang) yang mencapai 27.334,81 ha (55,42%) mengindikasikan bahwa Kabupaten Sukoharjo secara umum masih mempertahankan karakteristik ruang terbuka produktif yang luas. Secara spasial, bentang lahan pertanian ini mendominasi wilayah bagian tengah hingga selatan, seperti di Kecamatan Bulu, Weru, Tawang Sari, Nguter, dan Polokarto. Kondisi agraris yang masif ini menyebabkan persebaran penduduk di wilayah selatan tidak merata dan cenderung mengelompok pada kantong-kantong permukiman kecil (*spatially dispersed*), sehingga memicu tantangan geografis tersendiri dalam pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat (Wibowo dkk, 2025).

Lahan Permukiman yang mencakup luas 16.720,50 ha (33,90%) menjadi komponen artifisial terbesar yang berkorelasi langsung dengan konsentrasi kepadatan penduduk dan titik kebutuhan layanan medis dasar. Secara visual, aglomerasi permukiman urban bertumpu kuat di koridor utara yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, meliputi Kecamatan Kartasura, Grogol, dan Baki. Pertumbuhan ini linear dengan perkembangan kawasan Industri (4,90%) serta pusat Perdagangan dan jasa (2,41%) yang menjamur di Kecamatan Grogol dan Kartasura. Pola perkembangan wilayah utara yang bercorak perkotaan (*urbanized*) ini memicu terjadinya kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menuntut penyediaan unit FKTP dengan kapasitas pelayanan tinggi dan jangkauan radius operasional yang lebih pendek guna menghindari *overload* pasien (Hidayat & Utami, 2023).

Keberadaan elemen ruang lain seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 1,32%, Kawasan Lindung yang membentang di perbatasan selatan (Kecamatan Bulu), Perkebunan, Pemakaman, serta kawasan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) menjadi zona pembatas fisik sekaligus penyeimbang ekologis wilayah. Dengan proporsi lahan fasilitas publik, perdagangan, dan jasa yang relatif terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan sub-wilayah, optimalisasi penempatan dan pemetaan fasilitas kesehatan berbasis analisis spasial (*Geographic Information System*) mutlak diperlukan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa wilayah selatan yang memiliki keterbatasan aksesibilitas fisik dan wilayah utara yang mengalami tekanan kepadatan penduduk sama-sama mendapatkan distribusi layanan kesehatan yang adil dan merata (Pratama dkk, 2024).



Gambar 3.6 Peta Penggunaan Lahan

3.7 Penduduk

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek utama dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Mantra, 2020). Dalam perspektif sosiologis dan demografis, penduduk bukan sekadar kumpulan individu, melainkan suatu sistem dinamis yang strukturnya dipengaruhi oleh variabel kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi) (Nugroho, 2021).

Penduduk merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pemerintahan daerah, termasuk di Kabupaten Sukoharjo yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah administratif 49,323 Ha. Berdasarkan data kependudukan terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini mencerminkan stabilitas struktur demografis yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2025).

Jumlah kepala keluarga dan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo juga mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman. Tingginya kepadatan penduduk menunjukkan adanya tekanan terhadap ketersediaan lahan serta pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan. Oleh karena itu, dinamika kependudukan tahun 2025 menjadi faktor penting dalam analisis kebutuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), terutama dalam memastikan bahwa distribusi layanan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan merata (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025).

3.7.1 Struktur Penduduk

3.7.1.1 Umur dan Jenis Kelamin

Analisis struktur penduduk merupakan instrumen krusial dalam perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran komprehensif mengenai komposisi sumber daya manusia yang tersedia. Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, Kabupaten Sukoharjo menunjukkan dinamika demografi yang relatif stabil dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 918.610 jiwa, yang terdiri atas 459.225 laki-laki dan 459.376 perempuan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2026).

Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dengan rasio jenis kelamin yang mendekati angka ideal, sehingga menunjukkan struktur penduduk yang proporsional dan tidak mengalami ketimpangan gender yang signifikan. Sebaran penduduk menurut wilayah kecamatan juga memperlihatkan adanya variasi kepadatan yang dipengaruhi oleh perkembangan pusat-pusat ekonomi daerah. Wilayah seperti Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Hal ini tidak terlepas dari peran kedua kecamatan tersebut sebagai kawasan strategis yang berkembang dalam sektor industri, perdagangan, serta jasa, sehingga menarik mobilitas penduduk, khususnya kelompok usia produktif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025). Fenomena ini memperlihatkan adanya kecenderungan urbanisasi yang berdampak pada konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan.

Struktur umur penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-59 tahun), yang menunjukkan potensi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Di sisi lain, kelompok usia anak dan usia lanjut tetap memiliki proporsi yang signifikan, sehingga membutuhkan perhatian dalam penyediaan layanan

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan memahami struktur umur dan jenis kelamin secara komprehensif, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data (*evidence-based policy*), terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi serta memastikan pemerataan pelayanan publik sesuai kebutuhan masing-masing kelompok penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2026).

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo, 2025

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	26,251	24,725	50,976
5-9	34,079	32,056	66,135
10-14	35,810	33,974	69,784
15-19	37,022	34,854	71,876
20-24	34,999	33,373	68,372
25-29	34,067	32,849	66,916
30-34	32,563	32,038	64,601
35-39	30,420	30,068	60,488
40-44	35,558	35,179	70,737
45-49	34,968	35,094	70,062
50-54	30,330	31,456	61,795
55-59	27,662	29,472	57,134
60-64	22,867	25,356	48,223
65-69	18,337	19,703	38,040
70-74	11,851	12,125	23,976
75+	12,441	17,054	29,495

Total	459,225	459376	918,610
-------	---------	--------	---------

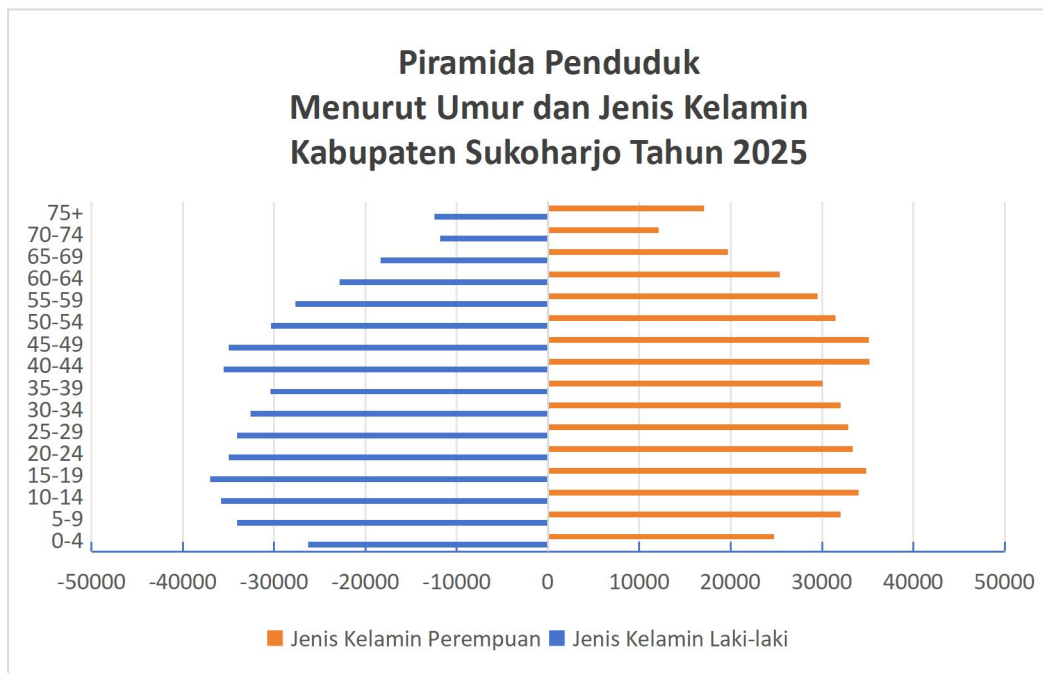
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2026

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia produktif dengan komposisi gender yang relatif seimbang. Pola ini kemudian tercermin secara visual dalam piramida penduduk, dimana bagian tengah piramida (usia 15-59 tahun) tampak lebih lebar dibandingkan bagian bawah dan atas. Bentuk ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki struktur penduduk yang cenderung konstruktif (stasioner menuju tua), yaitu kondisi ketika angka kelahiran mulai menurun namun jumlah penduduk usia kerja masih mendominasi.

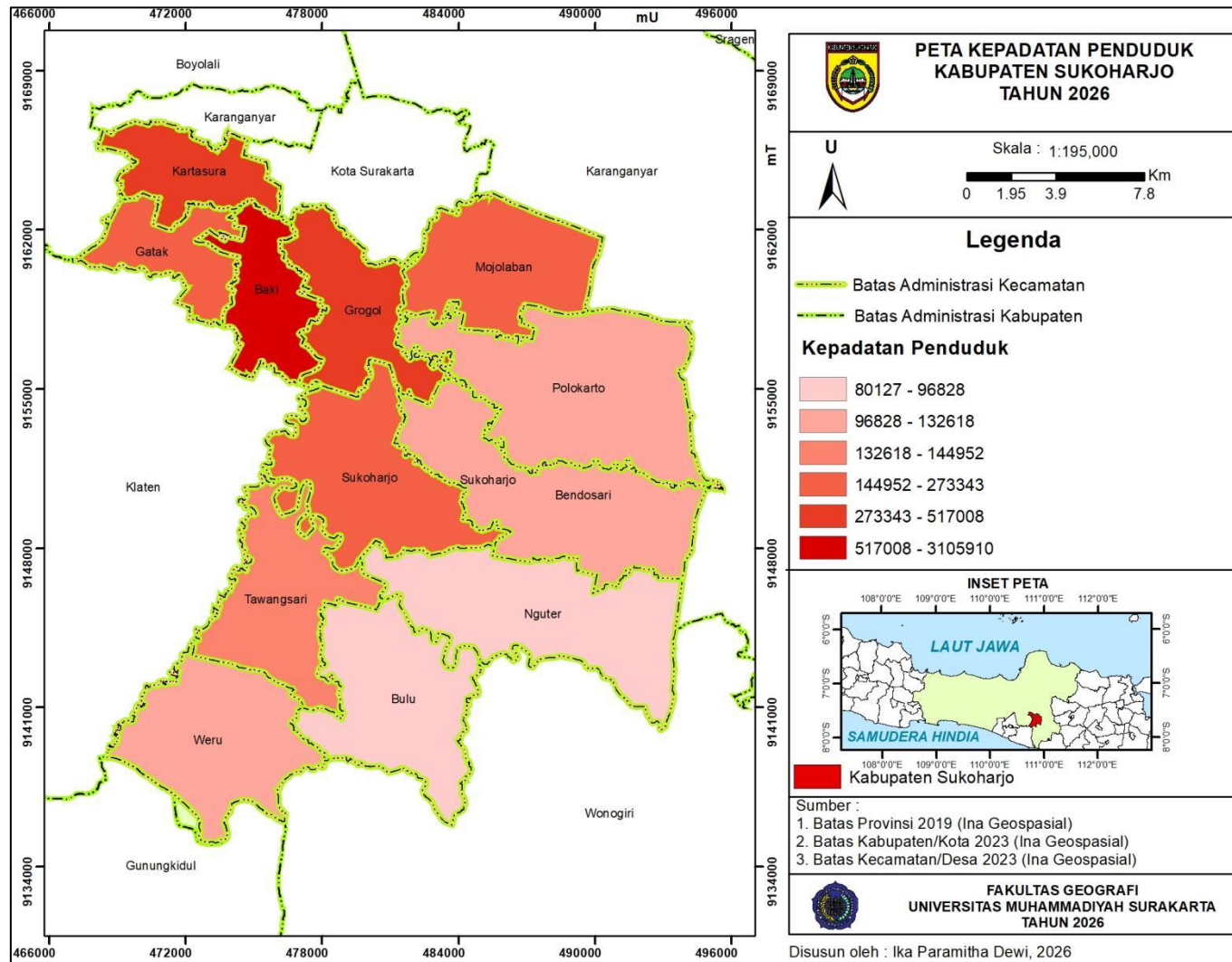
Keseimbangan antara penduduk laki-laki dan perempuan juga terlihat dari sisi kiri dan kanan piramida yang relatif simetris (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2026). Lebarnya bagian tengah piramida, khususnya pada kelompok umur 15-19 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun, memperkuat temuan pada tabel bahwa Kabupaten Sukoharjo sedang berada dalam fase bonus demografi. Kondisi ini mencerminkan tingginya potensi tenaga kerja yang dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah.

Namun demikian, bentuk piramida yang mulai menyempit pada bagian bawah (usia 0-14 tahun) juga mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan tingkat kelahiran. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya pasokan tenaga kerja di masa depan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025) Selain itu, bagian atas piramida yang relatif lebih kecil namun menunjukkan dominasi perempuan pada kelompok usia lanjut mengindikasikan peningkatan angka harapan hidup, khususnya bagi perempuan.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Sukoharjo secara bertahap mulai menghadapi proses penuaan penduduk (*ageing population*). Oleh karena itu, integrasi antara hasil analisis tabel dan piramida penduduk menegaskan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya perlu berfokus pada optimalisasi bonus demografi, tetapi juga harus mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta fasilitas ramah lansia di masa mendatang. Dengan demikian, analisis struktur penduduk berbasis tabel dan piramida memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2026).



Gambar 3.7 Piramida Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin



Gambar 3.8 Peta Kepadatan Penduduk

Berdasarkan peta tersebut, terlihat bahwa persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo tidak merata. Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi ditunjukkan oleh warna merah tua, yang tampak dominan di Kecamatan Grogol dan Kartasura. Tingginya kepadatan di kedua wilayah ini dipengaruhi oleh letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, sehingga berkembang sebagai kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi serta permukiman.

Kepadatan penduduk tinggi hingga sedang terlihat di Kecamatan Baki, Sukoharjo, dan Mojolaban. Wilayah-wilayah ini merupakan daerah penyangga yang mengalami perkembangan permukiman cukup pesat akibat perluasan aktivitas dari pusat kota. Sementara itu, wilayah dengan tingkat kepadatan rendah hingga sangat rendah ditunjukkan oleh warna yang lebih terang, yang terdapat di Kecamatan Weru, Bulu, dan Tawang Sari. Rendahnya kepadatan di wilayah ini disebabkan oleh dominasi penggunaan lahan untuk pertanian serta karakter wilayah yang masih bersifat pedesaan.

Pola persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan bahwa wilayah yang berdekatan dengan pusat kota memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang berada di bagian pinggiran. Ini mencerminkan adanya pengaruh urbanisasi dan perkembangan wilayah perkotaan terhadap distribusi penduduk.

3.7.1.2 Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan seluruh proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat (*long-life education*) di berbagai lingkungan dan situasi yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan individu. Pendidikan berperan sebagai sarana strategis dalam membentuk kualitas manusia serta mengarahkan peserta didik menuju kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan (Pristiwanti et al, 2022).

Tingkat pendidikan menjadi indikator utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus sebagai dasar dalam memproyeksikan daya saing ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2025, kondisi pendidikan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren yang semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di seluruh jenjang pendidikan, yaitu sebesar 99,21% pada kelompok usia 7-12 tahun, 96,84% pada usia 13-15 tahun, dan 89,67% pada usia 16-18 tahun.

Peningkatan menunjukkan semakin luasnya akses pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025). Struktur pendidikan penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah, namun mulai menunjukkan peningkatan pada proporsi penduduk yang menempuh pendidikan tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan perkembangan wilayah Sukoharjo sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari implementasi berbagai program pemerintah daerah, seperti wajib belajar 12 tahun, bantuan pendidikan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024).

Meskipun demikian, pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah pinggiran dan perbatasan, masih menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2025). Kualitas pendidikan masyarakat Sukoharjo pada tahun 2025 juga tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada komponen pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus mengalami pertumbuhan positif.

Pada tahun 2025, RLS Kabupaten Sukoharjo mencapai 9,48 tahun, yang berarti rata-rata penduduk telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP). HLS tercatat sebesar 13,21 tahun, yang mengindikasikan bahwa anak-anak usia sekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang Diploma I atau setara awal pendidikan tinggi. Nilai ini berada di atas rata-rata provinsi, yang menunjukkan capaian pendidikan Sukoharjo relatif lebih baik (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025). Peningkatan indikator pendidikan ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur pendidikan yang semakin merata di seluruh kecamatan, serta keberadaan berbagai institusi pendidikan tinggi di wilayah utara Sukoharjo, seperti Kartasura dan Grogol, yang berkembang sebagai pusat kegiatan akademik.

Kondisi ini menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif dan mendorong peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2025).

Tabel 1.8 Penduduk menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	186.500
2	Belum Tamat SD/ sederajat	91.420
3	Tamat SD/ sederajat	178.510
4	SLTP/ sederajat	147.410
5	SLTA/ sederajat	227.780
6	Diploma I/II	4.149
7	Akademi/DIII/Sarjana	21.630

	Muda	
8	Diploma IV/Strata I	54.690
9	Strata II	4.096
10	Strata III	280
Jumlah		916.465

Catatan: Angka di atas merepresentasikan penduduk usia 5 tahun ke atas (asumsi usia minimal pendidikan formal).

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 2025

Penduduk Kabupaten Sukoharjo menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa struktur pendidikan masih didominasi oleh jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok lulusan SLTA/ sederajat, yaitu sebanyak 227.780 jiwa, diikuti oleh penduduk dengan pendidikan tamat SD/ sederajat sebanyak 178.510 jiwa dan SLTP/ sederajat sebanyak 147.410 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang belum atau tidak pernah sekolah tercatat sebesar 186.500 jiwa, serta penduduk yang belum tamat SD/ sederajat sebanyak 91.420 jiwa.

Pada jenjang pendidikan tinggi, jumlah populasi relatif lebih sedikit. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan Diploma IV/Strata I (S1) tercatat sebanyak 54.690 jiwa, sedangkan untuk jenjang Akademi/DIII sebanyak 21.630 jiwa. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan Strata II (S2) dan Strata III (S3) masing-masing hanya sebanyak 4.096 jiwa dan 280 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 yang tercatat berdasarkan kriteria usia sekolah ke atas (terdata menamatkan atau sedang

menempuh pendidikan) adalah sebanyak 916.465 jiwa. Komposisi terbesar yang bertumpu pada jenjang pendidikan menengah mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo terus mengalami peningkatan secara bertahap.

3.7.1.3 Pekerjaan Penduduk

Pekerjaan bukan sekadar aktivitas produksi, melainkan penentu tingkat pendapatan yang secara langsung memengaruhi kemampuan penduduk dalam mengakses infrastruktur dasar. Di Kabupaten Sukoharjo, yang merupakan daerah penyangga kota (*sub-urban*), struktur pekerjaan penduduk yang heterogen antara sektor industri, pertanian, dan jasa menciptakan pola pergerakan yang berbeda dalam menjangkau layanan kesehatan (Sjafrizal, 2022).

Dinamika pekerjaan penduduk sangat dipengaruhi oleh kebijakan pasar tenaga kerja dan sebaran pusat kegiatan ekonomi. Dalam perspektif geografis, penduduk yang bekerja di sektor formal (seperti buruh pabrik di kawasan industri Grogol atau Nguter) memiliki pola jangkauan pelayanan yang terikat oleh waktu kerja (*time-constraint*), sehingga ketersediaan FKTP yang dekat dengan lokasi kerja atau jalur komuter menjadi sangat vital (Tjiptoherijanto, 2024). Sebaliknya, penduduk dengan pekerjaan di sektor informal atau agraris memiliki fleksibilitas waktu yang berbeda, namun sering kali terkendala oleh jarak fisik dan keterbatasan transportasi untuk mencapai pusat pelayanan (Sukirno, 2023).

Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo, 2025

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
I. Angkatan Kerja	270.845	216.732	487.577
a. Bekerja	258.630	205.914	464.544
b. Pengangguran Terbuka	12.215	10.818	23.033
II. Bukan Angkatan Kerja	87.410	161.225	248.635
a. Sekolah	42.315	39.280	81.595
b. Mengurus Rumah Tangga	8.742	104.615	113.357
c. Lainnya	36.353	17.330	53.683
Total	358.255	377.957	736.212

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sukoharjo menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu pada tahun 2025 didominasi oleh kelompok angkatan kerja. Tercatat sebanyak 487.577 jiwa termasuk dalam angkatan kerja, yang terdiri dari 464.544 jiwa bekerja dan 23.033 jiwa pengangguran terbuka (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025*).

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang termasuk dalam angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 270.845 jiwa dan 216.732 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih dominan dibandingkan perempuan (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025*).

Penduduk yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 248.635 jiwa, dengan jumlah perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Kegiatan mengurus rumah tangga merupakan aktivitas utama dalam kelompok ini, terutama pada perempuan yang mencapai 104.615 jiwa, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025*).

Penduduk yang masih bersekolah berjumlah 81.595 jiwa, yang menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia 15 tahun ke atas masih berada dalam proses pendidikan. Secara keseluruhan, struktur kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah terlibat dalam aktivitas ekonomi, meskipun perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan masih cukup terlihat (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2025*).

3.7.1.4 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk merupakan konsep fundamental dalam ilmu kependudukan dan geografi yang menggambarkan pola persebaran jumlah penduduk di suatu wilayah serta hubungan jumlah tersebut dengan ruang yang tersedia. Distribusi penduduk mencerminkan pola spasial dari warga suatu wilayah yang terbentuk melalui interaksi antara faktor fisik, sosial, dan ekonomi, yang pada akhirnya menentukan konsentrasi maupun kekosongan penduduk di berbagai lokasi (Santoso, 2020).

Distribusi penduduk tidak hanya menggambarkan jumlah, tetapi pola hubungan antara manusia dengan lingkungan ruang, dimana faktor ekonomi

dan kualitas hidup menjadi kekuatan pendorong utama. Secara keseluruhan, pemahaman distribusi penduduk menurut para ahli ini menekankan bahwa persebaran manusia di ruang geografis bukan sekadar angka, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara aspek demografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Wijaya, 2023).

Konsentrasi penduduk Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga Kota Surakarta yang memiliki aktivitas ekonomi dan jaringan transportasi berkembang. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara struktur ruang wilayah dan persebaran penduduk, dimana kecamatan dengan dominasi industri, perdagangan, dan jasa cenderung lebih padat dibandingkan wilayah perdesaan yang didominasi kegiatan pertanian.

Tabel 1.10 Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Sukoharjo, 2025

Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk
Weru	57.856	6,30
Bulu	37.061	4,03
Tawang Sari	56.995	6,20
Sukoharjo	100.555	10,95
Nguter	56.017	6,10
Bendosari	65.316	7,11
Polokarto	89.038	9,69
Mojolaban	93.349	10,16
Grogol	122.046	13,29
Baki	73.197	7,97

Gatak	54.936	5,98
Kartasura	112.244	12,22
Kabupaten Sukoharjo	918.610	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. (2025).

Kabupaten Sukoharjo dalam angka 2026.

Tabel diatas menunjukkan distribusi penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 berdasarkan wilayah kecamatan, baik dari sisi jumlah penduduk maupun persentasenya terhadap total penduduk kabupaten. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tercatat sebanyak 918.610 jiwa, dengan persebaran yang relatif tidak merata antar-kecamatan. Kecamatan Grogol merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 122.046 jiwa atau sekitar 13,29% dari total penduduk kabupaten. Tingginya jumlah penduduk di kecamatan ini menunjukkan perannya sebagai kawasan dengan aktivitas perkotaan dan ekonomi yang sangat dinamis, mengingat posisinya yang berbatasan langsung sebagai hinterland utama Kota Surakarta yang memicu pertumbuhan area permukiman secara masif.

3.7.2 Proses Penduduk

Proses penduduk atau dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah dan distribusi penduduk yang terjadi akibat interaksi antara tiga komponen demografis dasar, yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk), yang secara bersama-sama memengaruhi struktur umur, komposisi, serta persebaran penduduk di suatu wilayah (Yunawati et al, 2025). Perubahan dalam ketiga komponen menghasilkan pertumbuhan alami maupun migrasi netto yang menjadi pendorong utama perubahan demografis, sehingga pemahaman terhadap dinamika penduduk menjadi penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial-ekonomi.

3.7.2.1 Tingkat Kelahiran

Tingkat kelahiran merupakan salah satu komponen utama dalam proses kependudukan yang berperan dalam menentukan dinamika jumlah dan struktur penduduk. Dalam kajian demografi, tingkat kelahiran dipahami sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi pada periode tertentu, yang umumnya diukur melalui indikator *Crude Birth Rate* (CBR) dan *Total Fertility Rate* (TFR). CBR menggambarkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahun, sedangkan TFR menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi. Indikator ini digunakan para ahli untuk menilai kecenderungan pertumbuhan penduduk dan efektivitas kebijakan kependudukan yang diterapkan suatu wilayah (Dewantara, 2021).

Tingkat kelahiran memiliki peran strategis sebagai penentu utama pertumbuhan penduduk alami, yaitu selisih antara angka kelahiran dan angka kematian. Apabila tingkat kelahiran lebih tinggi dibandingkan kematian, maka populasi mengalami pertumbuhan, sebaliknya penurunan tingkat kelahiran menyebabkan perlambatan pertumbuhan penduduk. Para ahli demografi menyatakan perubahan tingkat kelahiran mencerminkan fase transisi demografi yang dialami suatu negara, khususnya pergeseran dari pola demografi tradisional menuju demografi modern yang ditandai oleh penurunan fertilitas dan mortalitas (Jurnal Dewantara, 2021).

Tingkat kelahiran menjadi indikator penting dalam proses transisi demografi. Penelitian dalam jurnal kependudukan nasional menunjukkan bahwa penurunan angka kelahiran di Indonesia berkaitan dengan peningkatan pendidikan perempuan, perubahan usia kawin pertama, serta meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia secara bertahap memasuki tahap lanjut transisi demografi, yaitu fertilitas mendekati tingkat penggantian (*replacement level*) dan berdampak pada perubahan struktur usia penduduk (Musytari, 2022).

Tabel 1.11 Jumlah Kelahiran Hidup per-Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup	
		N	%
1.	Weru	516	5,96
2.	Bulu	287	3,33
3.	Tawang Sari	532	6,17
4.	Sukoharjo	917	10,64
5.	Nguter	493	5,72
6.	Bendosari	592	6,87
7.	Polokarto	943	10,94
8.	Mojolaban	854	9,90
9.	Grogol	1.197	13,88
10.	Baki	737	8,55
11.	Gatak	486	5,64
12.	Kartasura	1.070	12,41
Jumlah		8.622	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Mengingat data proses demografi (kelahiran dan kematian) tahun 2025 tingkat kecamatan masih dalam tahap rekonsiliasi, maka digunakan data rilis resmi terakhir tahun 2024 sebagai representasi tren dinamis penduduk.

Tabel diatas menunjukkan jumlah kelahiran hidup menurut kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 8.622 kelahiran hidup yang dilaporkan, dengan distribusi yang bervariasi antarwilayah kecamatan. Kecamatan Grogol menjadi wilayah dengan

jumlah kelahiran hidup tertinggi, yaitu 1.197 kelahiran atau 13,88% dari total kelahiran di Kabupaten Sukoharjo.

Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Kartasura dengan 1.070 kelahiran (12,41%), serta Kecamatan Polokarto sebanyak 943 kelahiran (10,94%). Tingginya jumlah kelahiran di kecamatan-kecamatan tersebut dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk, kepadatan wilayah, serta dinamika sosial dan ekonomi yang relatif lebih berkembang. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah kelahiran hidup relatif rendah adalah Kecamatan Bulu, yang hanya mencatat 287 kelahiran atau 3,33% dari total keseluruhan.

Kecamatan lain dengan proporsi kelahiran yang juga lebih kecil antara lain Weru (514 kelahiran; 5,96%), Nguter (493 kelahiran; 5,72%), dan Gatak (486 kelahiran; 5,64%). Perbedaan jumlah dan persentase kelahiran hidup antar kecamatan ini menunjukkan adanya variasi kondisi demografis, seperti perbedaan struktur umur penduduk, tingkat fertilitas, serta akses terhadap fasilitas kesehatan dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran penting mengenai pola persebaran kelahiran hidup di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan kependudukan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

3.7.2.2 Tingkat Kematian

Tingkat kematian atau mortalitas dipandang sebagai indikator multidimensi yang mencerminkan ketahanan sistem kesehatan suatu wilayah pasca-krisis global. Para ahli dalam lima tahun terakhir menekankan adanya fenomena *epidemiological transition* yang bergeser kembali akibat dampak jangka panjang pandemi. Menurut World Health Organization (WHO, 2024), tingkat kematian global menunjukkan pola '*excess mortality*' atau kelebihan kematian yang tidak hanya disebabkan oleh penyakit menular, tetapi juga oleh gangguan layanan kesehatan rutin bagi penyakit tidak menular selama periode transisi 2021-2023. Struktur kematian pada masyarakat modern kini lebih

dipengaruhi oleh gaya hidup dan degradasi lingkungan perkotaan dibandingkan faktor biologis murni (Omran, 2021).

Di Indonesia, dinamika ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) melalui hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 yang mencatat penurunan angka kematian bayi (AKB), namun menunjukkan tantangan pada angka harapan hidup di wilayah dengan tingkat polusi dan kepadatan tinggi. Ketimpangan akses terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi penentu utama variasi tingkat kematian antarwilayah. Bagi daerah penyangga yang padat penduduk, beban mortalitas sering kali berkaitan erat dengan keterlambatan penanganan medis akibat jarak tempuh dan distribusi fasilitas yang tidak merata (Adlakha et al, 2023).

Tabel 1.12 Jumlah Kematian per Kecamatan di Kabupaten

Sukoharjo, 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kematian	
		N	%
1.	Weru	527	7,37
2.	Bulu	357	5,00
3.	Tawang Sari	516	7,22
4.	Sukoharjo	664	9,29
5.	Nguter	503	7,04
6.	Bendosari	458	6,41
7.	Polokarto	690	9,65
8.	Mojolaban	753	10,54
9.	Grogol	938	13,12
10.	Baki	433	6,06
11.	Gatak	433	6,06
12.	Kartasura	875	12,24
Jumlah		7.147	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Mengingat data proses demografi (kelahiran dan kematian) tahun 2025 tingkat kecamatan masih dalam tahap rekonsiliasi, maka digunakan data rilis resmi terakhir tahun 2024 sebagai representasi tren dinamis penduduk.

Tabel 1.12 menyajikan distribusi jumlah kematian per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dengan total keseluruhan sebanyak 7.147 kematian. Berdasarkan data, Kecamatan Grogol mencatat jumlah kematian tertinggi, yaitu 938 jiwa atau 13,12% dari total kematian di Kabupaten Sukoharjo. Tingginya angka kematian di kecamatan ini dikaitkan dengan jumlah penduduk yang relatif besar serta karakteristik wilayah yang berkembang pesat sebagai kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi. Kecamatan Kartasura menempati urutan kedua dengan 875 kematian (12,24%), diikuti oleh Kecamatan Mojolaban sebanyak 753 kematian (10,54%), dan Kecamatan Polokarto dengan 690 kematian (9,65%).

Kecamatan dengan jumlah kematian relatif lebih rendah antara lain Kecamatan Bulu, yang mencatat 357 kematian atau 5,00%, serta Kecamatan Baki dan Gatak yang masing-masing memiliki 433 kematian (6,06%). Kecamatan lain seperti Bendosari, Nguter, Tawang Sari, dan Weru menunjukkan proporsi kematian yang berada pada kisaran menengah. Variasi jumlah dan persentase kematian antar kecamatan ini mencerminkan perbedaan kondisi demografis, seperti struktur umur penduduk, tingkat kepadatan, serta faktor kesehatan dan lingkungan. Tabel diatas memberikan gambaran penting mengenai pola persebaran kematian di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan kesehatan masyarakat dan peningkatan layanan kesehatan di tingkat kecamatan.

3.7.2.3 Tingkat Migrasi

Menurut laporan *International Organization for Migration* (IOM, 2024), tingkat migrasi global menunjukkan pemulihan yang signifikan pasca-pandemi, dimana mobilitas tenaga kerja lintas batas kembali meningkat seiring dengan kebutuhan sektor jasa di negara-negara maju, migrasi saat ini lebih bersifat transnasional maupun lokal. Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, migrasi didominasi oleh mobilitas sirkuler pekerja industri menuju pusat-pusat pertumbuhan di bagian utara kabupaten.

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap di tempat yang baru yang dilakukan dengan cara melampaui batas administratif maupun batas politik/negara dari tempat asal ke tempat tujuan. Artinya, migrasi tidak hanya sekadar pindah tempat tinggal untuk sementara, tetapi melibatkan perubahan domisili yang relatif permanen di lokasi lain baik dalam satu negara maupun antarnegara (Achsini & Rosalinda, 2021).

Tabel 1.13 Angka Migrasi Masuk di Kabupaten Sukoharjo per Kecamatan, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Migrasi Masuk		Jumlah	Angka Migrasi Masuk	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan			
1.	Weru	254	313	567	9,79	5,17%
2.	Bulu	206	205	411	11,03	3,75%
1.	Tawang Sari	232	291	523	9,18	4,77%
2.	Sukoharjo	593	637	1.230	12,33	11,22%
3.	Nguter	370	380	750	13,41	6,84%
4.	Bendosari	344	372	716	11,02	6,53%
5.	Polokarto	390	478	868	9,83	7,92%
6.	Mojolaban	529	606	1.135	12,20	10,36%
9.	Grogol	634	711	1.345	11,05	12,27%

10.	Baki	407	457	864	11,93	7,89%
11.	Gatak	343	368	711	13,09	6,49%
12.	Kartasura	846	992	1.838	16,47	16,79%
Jumlah		5.148	5.810	10.958	141,33	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo 2024

Mengingat data proses demografi (kelahiran dan kematian) tahun 2025 tingkat kecamatan masih dalam tahap rekonsiliasi, maka digunakan data rilis resmi terakhir tahun 2024 sebagai representasi tren dinamis penduduk.

Tabel 1.13 diatas menyajikan angka migrasi masuk di Kabupaten Sukoharjo menurut kecamatan pada tahun 2024. Secara keseluruhan, jumlah migran masuk tercatat sebanyak 10.958 orang, terdiri atas 5.148 laki-laki dan 5.810 perempuan, dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 914.109 jiwa. Angka migrasi masuk kabupaten secara agregat mencapai 141,33.

Berdasarkan kecamatan, Kartasura merupakan wilayah dengan jumlah migrasi masuk tertinggi, yaitu 1.838 orang (16,77%), sekaligus memiliki angka migrasi masuk terbesar sebesar 16,47. Sebaliknya, Kecamatan Bulu mencatat jumlah migrasi masuk terendah, yakni 411 orang (3,75%), meskipun angka migrasi masuknya relatif lebih tinggi dibanding beberapa kecamatan lain, yaitu 11,03. Kecamatan Sukoharjo, Grogol, dan Mojolaban juga menunjukkan kontribusi migrasi masuk yang besar, masing-masing diatas 10% dari total migrasi kabupaten.

Data dalam tabel tersebut menunjukkan variasi signifikan antar kecamatan dalam hal jumlah dan angka migrasi masuk. Perbedaan tersebut mencerminkan ketimpangan daya tarik wilayah, yang kemungkinan

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, aksesibilitas, serta perkembangan kawasan perkotaan dan permukiman di masing-masing kecamatan.

Tabel 1.14 Angka Migrasi Keluar di Kabupaten Sukoharjo per Kecamatan, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Migrasi Keluar		Jumlah	Angka Migrasi Keluar	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan			
1.	Weru	254	269	523	9,03	5,66%
2.	Bulu	237	259	496	13,32	5,36%
3.	Tawang Sari	257	282	539	9,47	5,83%
4.	Sukoharjo	407	402	809	8,11	8,75%
5.	Nguter	310	311	621	11,11	6,72%
6.	Bendosari	301	315	616	9,48	6,66%
7.	Polokarto	288	341	629	7,13	6,80%
8.	Mojolaban	453	512	965	10,37	10,44%
9.	Grogol	630	706	1.336	10,98	14,45%
10.	Baki	348	378	726	10,03	7,85%
11.	Gatak	230	263	493	9,07	5,33%
12.	Kartasura	699	794	1.493	13,38	16,15%
Jumlah		4.414	4.832	9.246	121,48	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo 2024

Mengingat data proses demografi (kelahiran dan kematian) tahun 2025 tingkat kecamatan masih dalam tahap rekonsiliasi, maka digunakan data rilis resmi terakhir tahun 2024 sebagai representasi tren dinamis penduduk.

Tabel 1.14 menyajikan angka migrasi keluar di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 menurut kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar tercatat sebanyak 9.246 orang, terdiri atas 4.414 laki-laki dan 4.832 perempuan, dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

sebesar 914.109 jiwa. Angka migrasi keluar Kabupaten Sukoharjo secara total mencapai 121,48.

Kecamatan Kartasura merupakan wilayah dengan jumlah migrasi keluar terbesar, yaitu 1.493 orang atau 16,15% dari total migrasi keluar, serta memiliki angka migrasi keluar tertinggi sebesar 13,38. Kecamatan Grogol dan Mojolaban juga menunjukkan kontribusi migrasi keluar yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 1.336 orang (14,45%) dan 965 orang (10,44%). Sebaliknya, Kecamatan Gatak dan Bulu mencatat jumlah migrasi keluar paling rendah, masing-masing sebesar 493 orang dan 496 orang.

Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup nyata antar kecamatan dalam tingkat migrasi keluar. Variasi ini menggambarkan adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi, kesempatan kerja, serta tingkat mobilitas penduduk di masing-masing wilayah, yang memengaruhi keputusan penduduk untuk berpindah ke daerah lain.